**STATUS PERKAWINAN GEREJA YANG TIDAK DICATATKAN
DI KANTOR CATATAN SIPIL**

Benny Haryono, SH, MH

**Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12
Denpasar**

(benny.lawconsultant@gmail.com)

ABSTRAK , Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun jika tidak melakukan pencatatan perkawinan dapat mempengaruhi akses pasangan suami istri dalam melakukan kegiatan dari segi hukum atau dari segi moral dan segi social, seperti di duga melakukan perzinahan atau sebagainya, ini menimbulkan konsekuensi sosiologis dalam masyarakat, sehingga pencatatan perkawinan berperan dalam usaha rekayasa interaksi social dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah analisis normative, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan status perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil. Hasil dari penelitian ini adalah suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Akan tetapi, menimbulkan konsekuensi yuridis berkaitan dengan perkawinan tersebut. Dan dampak mengenai status perkawinan gereja yang tidak dicatatkan ialah tidak dapat melakukan perbuatan hukum serta tidak memiliki perlindungan hukum.

Kata Kunci : Perkawinan Gereja, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Kantor Catatan Sipil.

ABSTRACT, Marriage is an inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty. However, if marriage is not recorded, it can affect the couple's access to legal activities or moral and social aspects, such as allegedly committing adultery or so on, this has sociological consequences in the community, so that marital registration plays a role in the engineering of social interaction in

society. This research uses normative juridical research type. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal material analysis technique used is normative analysis, a way of interpreting and discussing the results of research based on the notion of law, legal norms, legal theories and doctrines relating to marital status that are not recorded in the civil registry office. The result of this research is a marriage that is not registered at the Civil Registry Office, so the marriage is still considered valid. However, there are juridical consequences related to the marriage. And the impact on the church's marital status that is not recorded is that they cannot do legal actions and have no legal protection.

Keywords: Church Marriage, Marriage Not Registered, Civil Registry Office

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Suatu perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan saja. Namun, perkawinan sangat berkaitan juga mengenai permasalahan agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum.

Permasalahan agama mengenai perkawinan ialah bahwa dalam setiap agama tentu memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur perkawinan, sehingga pada prinsipnya telah diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan

dari Agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Bagi umat Nasrani perkawinan adalah persekutuan hidup pria dan wanita yang monogami, yang arahkan kepembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan, yang disucikan Tuhan Yesus Kristus.

Dari sudut pandang hukum, perkawinan terjadi yang disebabkan oleh adanya hubungan antar manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan perkawinan yang menyebabkan timbulnya suatu perbuatan hukum. Perkawinan yang di dasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

¹Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²

Dalam hal ini setiap warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati Lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, kalau tidak maka perkawinan tersebut tidak sah.³

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki keragaman adat, budaya, bahasa, dan agama ini kita mengenal adanya suatu perkawinan yang di langungkan tanpa dicatatkan. Adapun perkawinan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan atau Perkawinan Siri.

Perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat, tetapi

tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang non-islam. Dalam system hukum Indonesia sendiri tidak mengenal istilah “kawin bawah tangan atau kawin siri” dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan.

Secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi“ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁴.

Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative.⁵

Untuk melaksanakan pencatatan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan, bahwa bagi yang bukan beragama bukan Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan

²Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³*Ibid*

⁴Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Wantjik K Shaleh, 1982, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 17.

Sipil, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pengaturan Masalah Kewenangan Di Bidang Catatan Sipil.

Saat ini di Denpasar Bali ada beberapa kasus mengenai pasangan yang melakukan perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara agama bagi umat Kristiani di Gereja. Namun, perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil dan dianggap sebagai kelalaian administratif. Seyogyanya negara tidak berkewajiban untuk mengakui serta melindungi perkawinan tersebut karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tidak melakukan pencatatan perkawinan dapat mempengaruhi akses pasangan suami istri dalam melakukan kegiatan dari segi hukum atau dari segi moral dan segi social, seperti di duga melakukan perzinahan atau sebagainya, ini menimbulkan konsekuensi sosiologis dalam masyarakat, sehingga pencatatan perkawinan berperan dalam usaha

rekayasa interaksi social dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “STATUS PERKAWINAN GEREJA YANG TIDAK DICATATKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dampak yang ditimbulkan dari perkawinan gereja yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ?
2. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan bila perkawinan gereja yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan gereja yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan bila perkawinan gereja yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak memuat suatu

ketentuan arti atau definisi tentang perkawinan, namun pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata saja, lain dari itu adalah tidak. Dengan kata lain, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan yang tata cara dan pelaksanaannya diserahkan kepada adat masyarakat atau agama dan kepercayaan dari orang-orang yang bersangkutan.⁶

Pemahaman tentang konsep perkawinan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana pengertian perkawinan menurut Pasal 1 yang berbunyi“

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Definisi atau pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Perkawinan dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga bahagia.⁸

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga tidak dimungkinkan terjadi hubungan perkawinan antara pasangan yang sama jenis kelaminnya. Persekutuan atau ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita biasa di

⁶Asyari Abdul Ghofar, 1992, *HukumPerkawinanAntar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-UndangPerkawinan*, CV. Gramada, Jakarta, hlm 16.

⁷Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁸Rusli dan R.Tama, 2000, *PerkawinanAntar Agama Dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung, hlm 11.

pandang sebagai suami-istri manakala ikatan mereka tersebut di dasarkan pada perkawinan yang sah. Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dipenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan menurut R. Wirjono Projodikoro, dimana perkawinan adalah hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perkawinan. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri, ikatan tersebut didasarkan pada adanya perkawinan yang sah, untuk sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Supaya perkawinan dapat di langungkan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dikelompokkan sebagai berikut :¹⁰

- a. Syarat-Syarat Materil
 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan

⁹WirjonoProjodikoro,1984, *HukumPerkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm 7.

¹⁰Ko Tjay Sing,1981, *HukumPerdataJilid I HukumKeluarga*, ItikadBaik, Semarang, hlm 134-131.

kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
3. Perkawinan di ijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

b. Syarat-Syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan.¹¹

Syarat-syarat formal terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Pemberitahuan Kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Di Kantor Catatan Sipil bagi yang non-muslim.
2. Penelitian Syarat-Syarat perkawinan. Penelitian syarat-syarat perkawinan dilakukan setelah ada pemberitahuan akan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Penelitian syarat-syarat perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan

¹¹Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hlm 114.

sudah terpenuhi
atau belum dan
apakah ada
halangan
perkawinan
menurut
Undang-
Undang.

3. Pengumuman
Tentang
Pemberitahuan
Untuk
Melangsungkan
Perkawinan.
Tujuan diadakan
pengumuman
ini, yaitu untuk
member
kesempatan
kepada umum
untuk
mengetahui dan
mengajukan
keberatan-
keberatan
terhadap di
langsungkannya
perkawinan.
Pengumuman
perkawinan
ditandatangani
oleh Pegawai
Pencatat
Perkawinan dan
memuat hal
ihwal orang
yang akan
melangsungkan
perkawinan itu

akan
dilangsungkan.¹²

Dengan mengingat
banyak hal-hal yang
mungkin timbul
dikemudian hari setelah
adanya suatu perkawinan,
baik dari pasangan suami
istri itu sendiri maupun dari
keluarga termasuk dari
orang tua diharapkan tidak
adanya perpecahan dalam
perkawinan tersebut
dikarenakan tidak adanya
kecocokan atau tidak
adanya penyesuaian
sebelumnya yang
disebabkan oleh
pelaksanaan perkawinan
tersebut bukan kemauan
dari salah satu pihak saja,
baik hanya kemauan dari
pasangan itu sendiri atau
kemauan dari keluarga
ataupun orang tua. Dengan
adanya persetujuan
perkawinan maka resiko
dan tanggungjawab dari
perkawinan tersebut dipikul
secara bersama-sama.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah
sesuatu yang sakral,
perkawinan adalah sesuatu
yang amat penting bagi
kehidupan manusia

¹²K. Wantjik Saleh, *Op. Cit*, hlm 19.

termasuk kehidupan agama, sering dianggap bahwa perkawinan adalah bagian dari ibadah. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa.

Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan di setiap agama pasti mempunyai tujuan yang jelas, tujuan perkawinan diharapkan dapat membuat suatu ketenangan dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.

- a. Tujuan Perkawinan menurut agama Kristen

Perkawinan menurut agama Kristen merupakan suatu persekutuan hidup antar seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan antara lain :

1. Meneruskan keturunan
Terdapat dalam Kitab Kejadian 1 : 28 “Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ini dan taklukanlah itu.”¹³
2. Mepererat ikatan cinta kasih
Terdapat dalam Kitab Efesus 5 : 33 “... Kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah

¹³InjilAlkitab Kitab Kejadian1 : 28.

menghormati suaminya.”¹⁴

3. Menjalani persekutuan hidup sesuai dengan perintah Allah Terdapat dalam Kitab Markus 10 : 8 – 9 “... demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh di ceraikan manusia.”¹⁵

4. Asas-Asas Perkawinan

Dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan perkawinan. Mengenai prinsip atau dasar perkawinan tersebut telah ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seperti yang dikemukakan oleh Djaren saragih bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶

Terdapat 6 (enam) asas-asas perkawinan yang termuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut¹⁷ :

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut

¹⁴Injil Alkitab Kitab Efesus 5 : 33.

¹⁵Injil Alkitab Kitab Markus 10 : 8 – 9.

¹⁶Djaren Saragih, 1980, *Himpunan Peraturan-Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Bidang Perkawinan Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm 137 – 138.

¹⁷*Ibid*

dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya tersebut dan perkawinan harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur asas monogami.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri tersebut harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian harus dengan dasar atau alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan dan diputuskan oleh Pengadilan.

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat, sehingga dengan demikian makan segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁸

Suatu perkawinan yang di langsungkan tanpa di

¹⁸*Ibid*

dasari oleh agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila dalam melaksanakan perkawinan namun tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim maka dinyatakan tidak sah menurut negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legi spositivis*. Konsep ini memandang hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan

diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu system normative yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menggunakan aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) ialah penggabungan kata-kata secara tepat dan menggunakan proses pikiran.²¹

3. Jenis Bahan Hukum

¹⁹Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 295.

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 13 – 14.

²¹Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 306.

Jenis bahan hukum dalam penelitian normative ini terbagi menjadi 2 (dua) bahan hukum antara lain sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- Buku-Buku tentang Perkawinan
- Pendapat para ahli
- Tulisan-Tulisan Ilmiah yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah analisis normative, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

F. Pembahasan

1. Dampak yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Gereja yang Tidak Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Indonesia sendiri mengatur aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1974 tentang Perkawinan dan Perautran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan dilakukan menurut agama dan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagi pasangan suami istri yang non-muslim. Hal tersebut memiliki arti bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan Perkawinan bagi pasangan yang non-muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil.²³

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Akan tetapi, menimbulkan konsekuensi yuridis berkaitan dengan perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan beberapa dampak antara lain sebagai berikut :

1. Status perkawinan dari suami isteri tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain, dicatatnya perkawinan maka secara otomatis bagi pihak suami dan istri akan mendapatkan perlindungan secara hukum. Contohnya jika dalam rumah tangga tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka sang isteri ataupun suami mengadu kepada pihak berwajib, maka pengaduannya sebagai isteri ataupun suami yang mendapatkan

²³WahyonoDarmabrata, 2003, *TinjauanUndang-Undang No.1 Tahun 1974 TentangPerkawinanbesertaUndang-Undang dan PeraturanPelaksanaanya*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, hlm. 102.

kekerasan tidak akan dibenarkan. Dikarenakan sang isteri ataupun suami tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta perkawinan yang resmi.

2. Pasangan suami isteri juga akan mengalami kesulitan yang berkaitan dengan urusan perbuatan hukum yang terkait dengan perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti otentik dari Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan membantu suami ataupun isteri untuk melakukan perbuatan hukum. Contohnya tidak dapat haknya sebagai seorang istri ataupun suami, dan mengenai status anak perkawinan yang tidak dicatatkan.

3. Berkaitan dengan legalitas perkawinan bagi hukum yang berlaku di

Indonesia.

Walaupun secara agama sebuah perkawinan itu sah tanpa dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil, pada dasarnya illegal menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi maka tidak akan terjamin keamanannya, misalnya terjadi pemalsuan dan kecurangan.

Contohnya, seorang suami ataupun isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang.

Dengan pencatatan yang resmi di Kantor Catatan Sipil maka hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan ialah untuk penjaminan akan ketertiban hukum sebagai instrument

kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu pembuktian perkawinan. Oleh karena itu pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama karena itu sah pula menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi belum dicatat maka menurut Bagir Manan, cukup dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.²⁴

2. Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Bila Perkawinan Gereja Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil

Bagi suami isteri yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dapat mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen dalam memenuhi syarat untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil antara lain sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bukti-bukti terjadinya perkawinan dari majelis gereja.
- b. Meminta surat perkawinan di Gereja
- c. Meminta surat pernyataan sari saksi-saksi perkawinan
- d. Membuat surat permohonan telah melakukan perkawinan gereja di Pengadilan Negeri dengan surat-surat dari majelis gereja dan saksi-saksi.
- e. Setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri, maka dapat mendaftarkan perkawinan tersebut dengan menunjukkan putusan ke Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Menurut Keyakinan Agama Kristiani salah satu hal yang dianggap sebagai salah satu sendi dari agama Kristiani adalah hal monogami, yaitu ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari seorang isteri. Dan menurut Agama Kristiani²⁵

²⁴NengDjubaidah,2010, *PencatatanPerkawinan&PerkawinanTidakDicatatMenurutHukumTertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, SinarGrafika, Jakarta.

²⁵R.SoetojoPrawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dan Perundang-*

perkawinan adalah persekutuan hidup laki-laki dan perempuan yang monogami, atas tata ciptaan Tuhan, yang disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus.

Menurut keyakinan Kristiani, pernikahan itu mempunyai dua aspek, yaitu aspek sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karena negara berhak mengaturnya menurut Undang-Undang. Kedua, perkawinan soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama. Dengan demikian gereja berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, wajiblah dilakukan berdasarkan hukum negara dan hukum agama.²⁶

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang penulis bahas diatas

maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Dampak dari perkawinan gereja yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil antara lain :
 - Status perkawinan dari suami isteri tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.
 - Pasangan suami isteri juga akan mengalami kesulitan yang berkaitan dengan urusan perbuatan hukum yang terkait dengan perkawinan.
 - Berkaitan dengan legalitas perkawinan bagi hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi maka tidak akan terjamin keamanannya, misalnya terjadi pemalsuan dan kecurangan
2. Penyelesaian yang dapat dilakukan bila perkawinan gereja tidak

undanganPerkawinan di Indonesia, Airlangga University, Surabaya.

²⁶LemataTarigan,2003, *PerkawinanAntar Agama DitinjaudariUndang-UndangPerkawinan No. 1/1974*, makalahsebagaitugasdalamatakuliahKapitaSelektHukumAdat pada Program Studi S2 IlmuHukum, PPs UU.

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil antara lain :

- Mengumpulkan bukti-bukti terjadinya perkawinan dari majelis gereja.
- Meminta surat perkawinan di Gereja
- Meminta surat pernyataan sari saksi-saksi perkawinan
- Membuat surat permohonan telah melakukan perkawinan gereja di Pengadilan Negeri dengan surat –surat dari majelis gereja dan saksi-saksi.
- Setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri, maka dapat mendaftarkan perkawinan tersebut dengan menunjukkan putusan ke Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Gereja berpendapat bahwa agar perkawinan

itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, wajiblah dilakukan berdasarkan hukum negara dan hukum agama.²⁷

2. Saran

1. Dalam melakukan suatu proses perkawinan, seharusnya para pihak telah terlebih dahulu mengerti dan memahami mengenai tata cara pelaksanaan proses perkawinan yang telah dimuat di dalam perundang-undangan di Indonesia terutama yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlu diketahui pula oleh para pasangan yang hendak menikah bahwa suatu perkawinan akan sah menurut hukum apabila perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya.

²⁷Lemata Tarigan, 2003, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, makalah sebagai tugas dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Adat pada Program Studi S2 Ilmu Hukum, PPs UU.

2. Penulis menyarankan bahwa agar tujuan daripada perkawinan itu sendiri sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terselenggara dengan baik tanpa adanya suatu kesulitan yang ditemui oleh para pasangan suami isteri, hendak perkawinan tersebut dilaksanakan pula sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada yang terlewat agar tidak menjadi suatu perkara yang rumit dikemudian hari dan agar mempermudah segala urusan-urusan yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri atau yang berhubungan dengan Kantor Catatan Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Asyari Abdul Ghofar, 1992, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-*

Undang Perkawinan, CV. Gramada, Jakarta.

Djaren Saragih, 1980, *Himpunan Peraturan-Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Bidang Perkawinan Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Itikad Baik, Semarang.

Lemata Tarigan, 2003, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, makalah sebagai tugas dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Adat pada Program Studi S2 Ilmu Hukum, PPs UU.

Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University, Surabaya.

Rusli dan R. Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.

Ronny HanitjoSoemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.*

Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya*, CV. Gitama Jaya, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.